

**PERAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM  
MEMFASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN TOL SIGLI-BANDA  
ACEH**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**CUT INTAN AVENA**

NIM. 210802108

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2025**

## KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cut Intan Avena

NIM : 210802108

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Kreung Geukeuh, 10 November 2003

Alamat : Jl. Lestari 1, Rt 04/04, Curug, Bojongsari Kota Depok

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 April 2025

Yang Menyatakan,



**CUT INTAN AVENA**

NIM. 210802108

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM  
MEMFASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN TOL SIGLI-BANDA**

**ACEH**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**CUT INTAN AVENA**

**NIM. 210802108**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**A R - R A N I R Y**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing



**Dr. Sa'd Amirulkamar, M.M., M.Si.**

**NIP: 196110051982031007**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**  
**PERAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM**  
**MEMFASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**  
**MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN TOL SIGLI-BANDA**  
**ACEH**

**SKRIPSI**

**CUT INTAN AVENA**  
**NIM. 210802108**

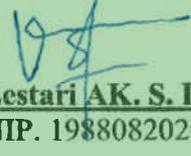
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara  
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.

  
Lestari AK. S. IP

NIP. 196110051982031007

NIP. 1988082020122020

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Delfi Suganda, S.HL., LL.M.

  
Arif Akbar, M.A

NIP. 198611122015031005

NIP. 199110242022031001

Mengetahui  
Dekan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Dinas Pertanahan Aceh memainkan peran krusial dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat yang muncul seiring dengan pembangunan Tol Sigli-Banda Aceh. Proyek infrastruktur ini sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan publik dan hak-hak masyarakat lokal atas tanah yang mereka kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pertanahan dalam menangani sengketa tanah, menganalisis permasalahan yang timbul dalam fasilitasi penyelesaian sengketa, serta menilai dampaknya terhadap masyarakat dan proses pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pegawai Dinas Pertanahan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, ditambah analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan berperan aktif dalam memediasi, memberikan informasi hak-hak tanah, dan berupaya menciptakan kesepakatan yang adil. Namun, terdapat beberapa permasalahan serius dalam proses fasilitasi, antara lain sosialisasi yang kurang efektif dan bersifat satu arah, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, ketidakjelasan mekanisme ganti rugi, serta kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembebasan lahan. Permasalahan-permasalahan ini memperbesar potensi ketidakpuasan masyarakat dan memperpanjang konflik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak atas tanah dan kompleksitas hukum pertanahan juga memperburuk situasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Pertanahan Aceh sangat vital, tetapi perlu adanya peningkatan kapasitas internal, perbaikan pola komunikasi publik, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta transparansi dalam mekanisme ganti rugi agar sengketa tanah dapat diselesaikan lebih efektif. Upaya perbaikan ini diharapkan mampu mengurangi konflik agraria di masa depan dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dinas Pertanahan Aceh, Sengketa Tanah, Infrastruktur, Tol Sigli-Banda Aceh, Mediasi, Hak Tanah, Kompensasi, Fasilitasi Sengketa, Koordinasi Antar Lembaga, Sosialisasi.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Penulis Panjatkan Ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Atas Segala Limpahan Rahmat, Taufik, Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Lancar. Shalawat Dan Salam Tidak Lupa Kita Sanjung Sajikan Atas Pangkuan Nabi Kita Muhammad SAW. Skripsi Ini Yang Berjudul **"PERAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM MEMFASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN TOL SIGLI-BANDA ACEH"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Zubaedah dan ayahanda tersayang Safrijal yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, dan mendidik, serta mendoakan penulis sampai saat ini. Semoga ketulusan keduanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si., selaku dosen pembimbing.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, atas doa, nasehat, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
9. Kepada saudara kandung Adik-Adik yang juga menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya terutama Putri Rahmadhani, dan Sari Wahyuni yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik diluar dan dikampus.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2021 Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu dan mendoakan sehingga ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Terimakasih kepada Cilal yang selalu memberi dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Pihak-pihak yang lain yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik materiil maupun moril.

**Banda Aceh, 25 April 2025**

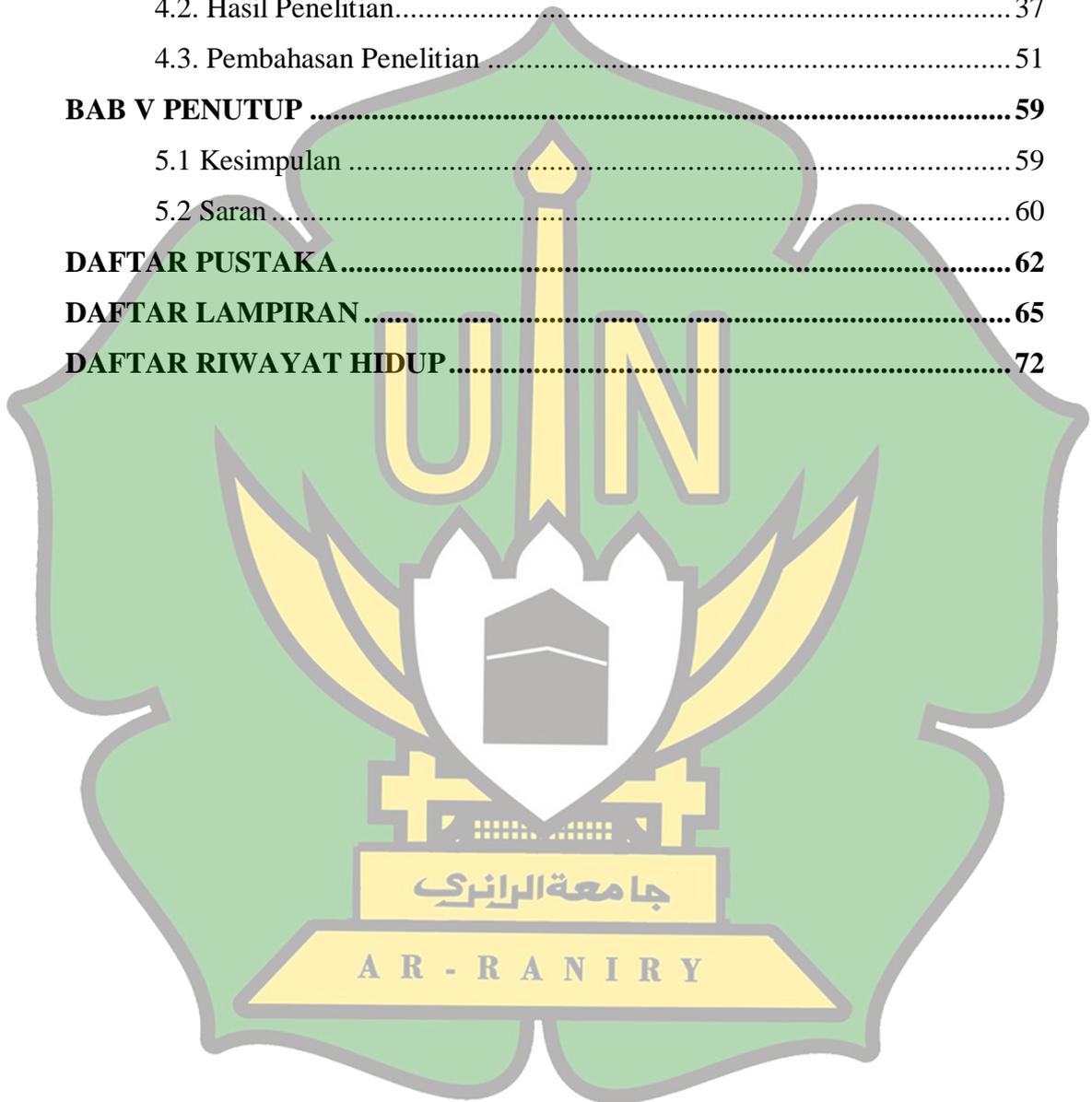
**Cut Intan Avena**

**Nim: 210802108**

## DAFTAR ISI

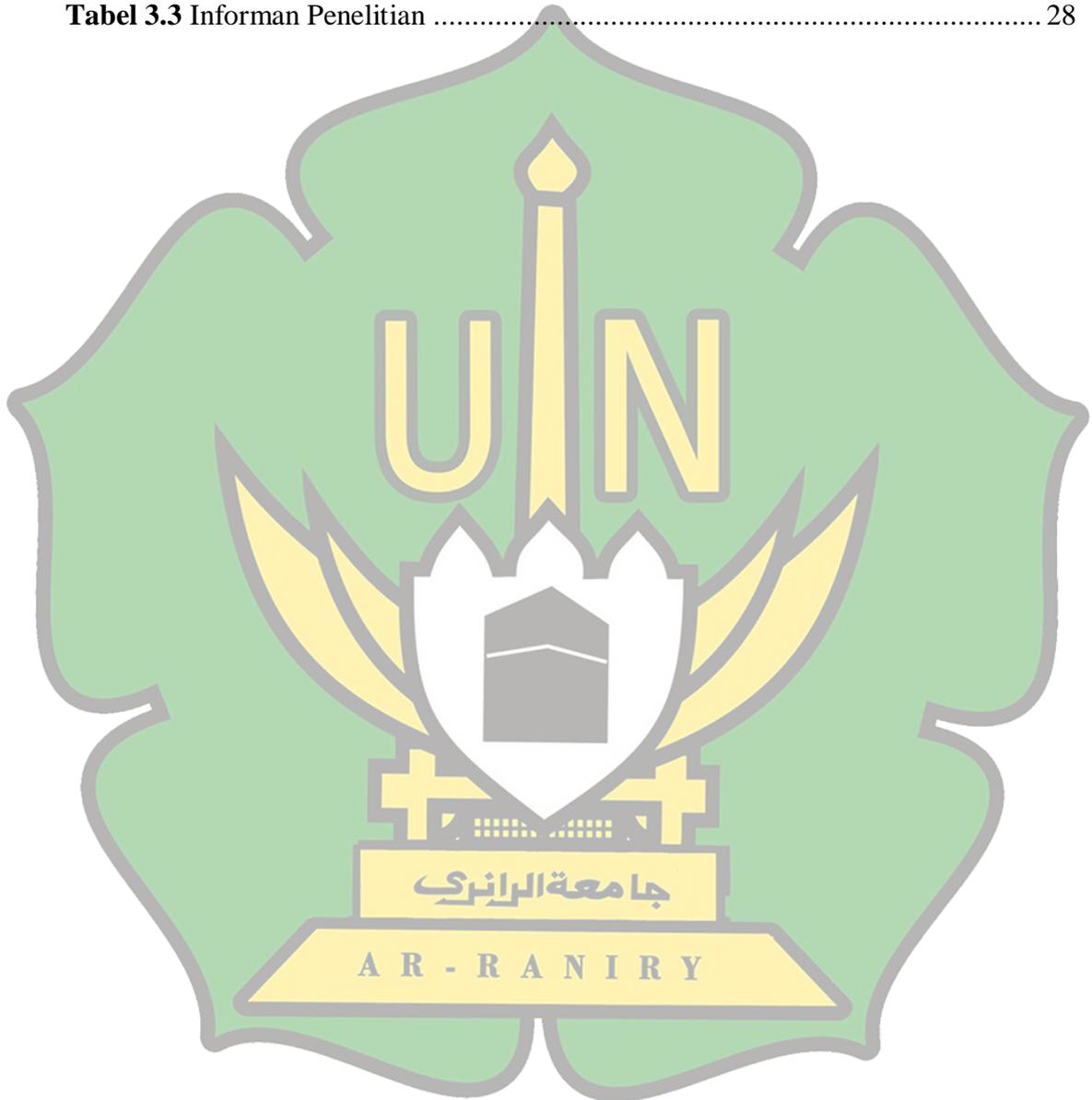
<b>KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Rumusan masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Teori Peran ( <i>Role Theory</i> ) .....	10
2.2. Konsep Pertanahan .....	12
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Aceh.....	14
2.4. Sengketa.....	16
2.5. Konsep Fasilitasi dalam Penyelesaian Sengketa.....	18
2.6. Penelitian Terdahulu .....	19
2.7. Kerangka berpikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	25
3.2. Fokus penelitian .....	25
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.4. Informan Penelitian .....	27
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7. Teknik Analisis Data .....	31

3.8. Teknik Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	35
4.2. Hasil Penelitian.....	37
4.3. Pembahasan Penelitian .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Peran dan Indikator.....	26
<b>Tabel 3.2</b> Kendala dan Indikator.....	27
<b>Tabel 3.3</b> Informan Penelitian .....	28



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan, pemerintah perlu membangun sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan infrastruktur. Infrastruktur adalah komponen vital yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal dan sumber daya alam, yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.”<sup>1</sup>

Infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, jaringan listrik, dan sistem komunikasi sangat penting untuk memperlancar arus transportasi, logistik, dan mobilitas masyarakat. Investasi dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga efisiensi dan daya saing suatu wilayah atau negara. Dengan adanya infrastruktur yang kuat, akses terhadap pasar menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur harus sejalan dengan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, dan secara keseluruhan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>1</sup> A. Fauzi, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Citra Nusantara*, Vol. 3 No. (n.d.).

Dalam perkembangan keagrariaan di Indonesia dan Aceh maka sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Negara dapat mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa”).<sup>2</sup> Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah merupakan wewenang Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan pembangunan tersebut seperti penggunaan, persediaan, serta pemeliharannya atas sumber-sumber agraria seperti bumi, air dan ruang angkasa.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan yang kekinian, maka dibangunlah jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalan tol. Infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem transportasi yang efisien dan terhubung.<sup>3</sup>

Keberadaan jalan tol sendiri memiliki peranan strategis dalam mendukung mobilitas dan kelancaran arus lalu lintas dimana jalan tol mampu menyediakan akses yang lebih cepat dan lancar bagi kendaraan, sehingga dapat menghemat waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan. Selain itu, jalan tol juga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan-jalan umum, meningkatkan keselamatan berkendara, serta mendorong pemerataan

---

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.

<sup>3</sup> Aidil Abrar Donny Zulman, Sony Adiya Putra, “Efektivitas Jalan Tol Bagi Moda Transportasi Kota Dumai (Studi Kasus: Angkutan Travel PT. Karya Maju Express),” *SLUMP TeS: Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 1 No. 1 (2021), n.d.

pembangunan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat mobilitas barang serta jasa.

Pembangunan jalan tol termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.”<sup>4</sup> Undang-Undang ini menyebutkan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melibatkan pengadilan.

Pengadaan tanah untuk pembangunan dapat dilakukan dengan musyawarah antar pihak untuk mencapai mufakat dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, Lembaga Pertanahan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Penetapan Pengadilan Negeri ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.<sup>5</sup>

Pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh yang telah selesai merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di wilayah Aceh. Namun,

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan,” 2012.

<sup>5</sup> Tri Susilaningsih, “Musyawarah Dalam Penentuan Ganti Kerugian Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 214–24, <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2770>.

dalam proses pembangunan ini, muncul berbagai persoalan, terutama terkait dengan pembebasan tanah. Salah satu isu utama adalah perebutan kepemilikan hak atas tanah antara masyarakat dan pemerintah, yang sering kali dikenal sebagai “Tanah Sengketa.”<sup>6</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pertanahan memainkan peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pertanahan di Aceh, Dinas Pertanahan diharapkan dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dan konflik tanah. Mereka tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga memastikan kelancaran pelaksanaan proyek strategis nasional. Dengan demikian, Dinas Pertanahan berfungsi untuk menegakkan keadilan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penyelesaian sengketa tanah memiliki dinamika yang unik, karena menggabungkan berbagai sistem hukum. Aceh menerapkan kombinasi hukum nasional, hukum adat dan aturan khusus yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.”<sup>7</sup> Keberadaan hukum adat, yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat, menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Oleh karena itu, upaya Dinas Pertanahan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan berkeadilan.

<sup>6</sup> Subekti Tahta Faradhiba, “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Antara Para Pemegang Hak,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* vol 14 No (n.d.).

<sup>7</sup> Muhammad Habibi, “Multicultural Dispute Resolution System in Aceh Before and After the Enactment of Law Number 11 of 2006,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 (2022), n.d.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanahan Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Aceh juga menghadapi berbagai kendala serius. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya efektivitas dalam proses sosialisasi kepada masyarakat terdampak, di mana informasi mengenai hak-hak atas tanah dan mekanisme ganti rugi sering kali disampaikan secara terbatas dan bersifat satu arah, sehingga memicu ketidakpuasan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Koordinasi antar lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan pelaksana proyek, juga sering kali berjalan tidak optimal, menyebabkan ketidaksinkronan data, lambatnya penyelesaian klaim, dan memperpanjang konflik. Di sisi lain, mekanisme pemberian ganti rugi kerap dianggap tidak transparan dan adil oleh masyarakat, memperburuk resistensi terhadap proses pembebasan lahan. Kurangnya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa juga memperbesar peluang munculnya konflik lanjutan. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa upaya fasilitasi yang dilakukan Dinas Pertanahan Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, serta dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Hal-hal tersebut menjadi isu penting yang perlu dikelola dengan baik meskipun jalan tol tersebut telah selesai dibangun dan beroperasi, pengalaman penyelesaian sengketa dan konflik tanah selama proses pembangunan masih menjadi isu penting yang perlu dipelajari. Hal ini karena

pola-pola penyelesaian tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek serupa dimasa depan.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek terkait peran Dinas Pertanahan Aceh dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik dalam pembebasan tanah yang timbul pada proses pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh atau yang biasa disebut (Sibanceh). Fokus utama adalah untuk memahami sejauh mana kontribusi Dinas Pertanahan Aceh dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah, termasuk tugas, tanggung jawab, serta strategi yang mereka terapkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas mekanisme fasilitasi penyelesaian sengketa tanah yang diterapkan, baik dari sisi kelancaran pembangunan jalan tol maupun dampaknya terhadap masyarakat terdampak.

Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses fasilitasi penyelesaian sengketa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran penting dari pengalaman Dinas Pertanahan Aceh dalam menangani fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan pada proyek infrastruktur bersekala besar. Lebih jauh penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan sengketa tanah pada proyek pembangunan dimasa depan, guna memastikan keseimbangan antara kelancaran pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dalam melakukan identifikasi masalah terhadap penelitian maka berlandaskan latar belakang masalah, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pertanahan Aceh dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat selama proses pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.
2. Hambatan yang dihadapi, seperti perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, keterbatasan data pertanahan, kurangnya transparansi, serta kurang optimalnya sosialisasi terkait proses pembebasan tanah dan hak-hak masyarakat.

## 1.3. Rumusan masalah

Masalah dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pertanahan Aceh dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat selama pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pertanahan Aceh Dalam Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Pada Pembangunan Tol Sibanceh?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pertanahan Aceh dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat selama pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah masyarakat dalam pembangunan tol sibanceh, khusus terkait persepsi masyarakat, data pertanahan, transparansi, dan sosialisasi.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai Dinas Pertanahan Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Akademis**

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang dinamika penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia. penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu pertanahan, manajemen konflik, serta kebijakan publik. Selain itu penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kurikulum pendidikan di bidang agraria, studi pembangunan, dan ilmu sosial, dengan memberikan contoh nyata tentang bagaimana kebijakan pertanahan diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang peran lembaga pemerintah dalam penanganan konflik tanah dan penyelesaian sengketa, serta memicu penelitian lanjutan yang dapat menggali

lebih dalam tentang pendekatan-pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia.

b. Praktis

Kajian ini diharapkan memberikan panduan bagi Dinas Pertanahan Aceh dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan peran, dan strategi dalam menyelesaikan sengketa tanah dimasa depan. Penelitian juga diharapkan memberikan wawasan kepada pemerintan daerah, pengembang proyek, dan masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi, transparansi, dan pendekatan berbasis sosial budaya dalam penyelesaian konflik agraria. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah serta pentingnya memahami prosedur yang berlaku untuk mencapai solusi yang adil dan transparan.

